

ABSTRAK

Kebijakan penyaluran LPG bersubsidi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, termasuk dugaan kelalaian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Skripsi ini mengkaji pertanggungjawaban pidana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kebijakan LPG bersubsidi dengan studi kasus kematian Yonih, yang diduga berkaitan dengan kegagalan dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan melihat original intent dari suatu peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu melihat bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana oleh korporasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dijalankan oleh Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dalam perumusan maupun pelaksanaannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), serta hubungan kausal antara kebijakan atau kelalaian pengawasan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban tersebut dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan kewenangan, kelalaian jabatan, dan kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penerapan asas *ultimum remedium* dan doktrin *corporate criminal liability* menjadi pertimbangan penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana terhadap institusi negara dan pejabat yang menjalankan kebijakan LPG bersubsidi.

Kata kunci: Kementerian ESDM, Kebijakan Publik, Pertanggung jawaban pidana, Korporasi

ABSTRACT

The subsidized LPG distribution policy represents a form of state responsibility to ensure the welfare of the community, particularly those in the economically disadvantaged. However, in its implementation, this policy often raises legal and social issues, including allegations of negligence resulting in loss of life. This thesis examines the criminal liability of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) for the subsidized LPG policy, using the case study of Yonih's death, which is allegedly related to failures in policy formulation, supervision, and implementation.

The research method used is a normative juridical approach, with the approach being the Statute Approach, which examines the original intent of a statutory regulation, and the Conceptual Approach, which examines the concept of criminal liability by corporations.

The results indicate that public policies implemented by the Ministry of ESDM have the potential to give rise to criminal liability if their formulation and implementation are proven to meet the elements of a criminal offense, namely an unlawful act, an element of error in the form of intent or negligence (culpa), and a causal relationship between the policy or negligent supervision and the resulting consequences. In the context of criminal law, this liability can be linked to the concepts of abuse of authority, negligence of office, and crimes against life, as stipulated in the Criminal Code and related laws and regulations. Furthermore, the application of the principle of ultimum remedium and the doctrine of corporate criminal liability are important considerations in determining the limits of criminal liability for state institutions and officials implementing subsidized LPG policies.

Keywords: Ministry of Energy and Mineral Resources, Public Policy, Criminal Liability, Corporations